

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Desa adalah salah satu bagian wilayah dari sebuah Kabupaten/ kota, memiliki otonomi asli, dalam batasan otonomi asli, oleh karena itu desa dapat mengelola potensi desa baik dalam bentuk sumber daya alam maupun sumber daya manusia dengan tujuan agar mampu mengembangkan ekonomi desa sehingga dapat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat desa. Desa berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia[1].

Mengacu pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan baru bagi desa untuk mewujudkan desa yang mandiri. Konsep kemandirian desa yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah pemerintah desa mempunyai kewenangan secara otonom dalam melaksanakan pembangunan desa yang akan disesuaikan dengan kearifan lokal yang dimiliki oleh desa sehingga hasilnya diharapkan mampu sesuai dengan harapan masyarakat desa[1].

Salah satu kewenangan yang dimiliki desa berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 adalah, desa dapat mendirikan Badan usaha Milik Desa dan dapat mengembangkan kemampuan sumber daya ekonomi dan keuangannya dalam rangka memberikan keuntungan untuk pertumbuhan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam menumbuhkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sebaiknya melibatkan Badan Usaha Milik Desa sebagai lembaga yang mengatur dan mengurus. Menurut PP No 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, telah memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus urusan di wilayahnya. Dengan itu kehadiran bumdes memiliki peran penting dalam mengelola potensi desa sebagai langkah untuk memberikan peningkatan pendapatan asli desa (PADes).

Pengertian BUMDes menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa[2]. Adapun pengertian lain tentang BUMDes yaitu sebuah lembaga yang mempunyai fokus utama dalam pemberdaya ekonomi masyarakat desa dengan mengelola berbagai macam potensi desa yang dimiliki [3]. Dengan dibentuknya BUMDes harapannya dapat mengembangkan dan mengelola unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam menjalankan usahanya ada beberapa hal keilmuan materi yang harus dikuasai dalam oleh

pengelola BUMDes, yaitu diantaranya Peta jalan BUMDes harus bekerja secara optimal, Memperkuat kewirausahaan, Kepemimpinan yang harus berkompeten, Mempunyai inovasi baru dalam pemasaran, Kerjasama, dan Tata kelola keuangan BUMDes[4].

Dengan adanya Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes bagian dampak dari efek kebijakan Undang-Undang cipta kerja sehingga BUMDes dituntut untuk mempunyai tugas lebih dalam tata kelola dan pemanfaatan potensi desa yang dikelola BUMDes nantinya. Potensi Desa merupakan sebuah nilai lebih yang dimiliki oleh suatu desa dalam bentuk sumber daya fisik maupun non fisik. Namun dalam perkembangannya potensi yang dimiliki oleh desa tersebut belum sepenuhnya di kembangkan dan dikelola dengan baik oleh masyarakat desa. Kedua sumberdaya yang dimiliki mempunyai peran penting dalam proses pembangunan desa sehingga dapat menunjang perekonomian desa dan berkembang menjadi desa yang mandiri[4].

Proses pembentukan BUMDes telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, yaitu BUMDes didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan Pendiriannya ditetapkan dengan peraturan Desa. "Peraturan desa" yang dimaksud adalah penetapan pendirian BUMDes, Anggaran dasar BUMDes, dan Penetapan besarnya penyertaan modal Desa dan/atau masyarakat Desa dalam rangka pendirian BUMDes [2]. Berdasarkan data penelitian Helenius Ajo Leda dengan judul penelitian "*Strategi Meminimalisir Kegagalan BUMDes*" di Indonesia pada tahun 2021 sendiri secara kuantitatif, terdapat sekitar 51.129 BUMDes yang telah dibentuk, ada 37.861 BUMDes yang

masih aktif dan telah dilakukan profoling untuk 18.195 BUMDes dengan kategori 1.652 BUMDes yang mengalami kemajuan, 9.682 BUMDes yang dalam proses berkembang dan 3.861 BUMDes pemula atau baru dibentuk. Seiring berjalannya waktu perkembangan BUMDes akan terus mengalami peningkatan atau bertambah dengan tujuan menjadi aset penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional, yang terdapat dalam filosofi utama dari Nawacita yaitu “*satu kota tidak bisa membangun seribu desa, tetapi seribu desa akan sangat mudah membangun Kota*” [5]. Dalam proses pengelolaan BUMDes juga terdapat beberapa hambatan sehingga masih banyak juga terdapat BUMDes yang mengalami mangkrak atau tidak berkembang dalam mengelola unit usaha yang ada. Berdasarkan riset bumdes id terdapat sebanyak 8.000 BUMDes pada rapat terbatas Kabinet di Istana Bogor 11 Desember 2020, terdapat sebanyak 2000 BUMDes yang mengalami mati suri atau tidak aktif lagi sehingga belum mampu berkontribusi banyak bagi kesejahteraan warga desa dan pembangunan desa. Dalam proses pengelolaan BUMDes juga terdapat beberapa hambatan sehingga masih banyak juga terdapat BUMDes yang mengalami mangkrak atau tidak berkembang dalam mengelola unit usaha yang ada. Berdasarkan riset bumdes id terdapat sebanyak 8.000 BUMDes pada rapat terbatas Kabinet di Istana Bogor 11 Desember 2020, terdapat sebanyak 2000 BUMDes yang mengalami mati suri atau tidak aktif lagi sehingga belum mampu berkontribusi banyak bagi kesejahteraan warga desa dan pembangunan desa [5]. Untuk di daerah DIY sendiri masih terdapat kendala dalam melaksanakan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini disebabkan karena berbagai permasalahan dihadapi desa yang

belum bisa diurai seperti kesulitan dalam menentukan roadmap hingga menentukan sosok pengelola yang mumpuni.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang mempunyai fokus pembahasan mengenai kegagalan BUMDes dalam sistem pengelolaan unit usaha. Dapat dilihat dari contoh BUMDes yang berlokasi di Kabupaten Banyuwangi yang sistem tata kelolanya tidak begitu optimal, yang mana dalam pengelolaan BUMDes yang masih cenderung sederhana sehingga dapat dikatakan peran pengelolaan BUMDes yang masih lemah, yang menimbulkan dampak yang dapat dirasakan dari segi keuntungan sehingga masyarakat sekitar juga merasakan dampak yang sama akibat dari tidak optimalnya pengelolaan BUMDes. Dilain sisi SDM yang berada dalam struktur organisasi BUMDes mayoritas melibatkan unsur pemerintah terlebih khusus di posisi kepala BUMDes yang memegang jabatan adalah kepala desa mempunyai posisi sentral dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu dalam pengelolaan BUMDes tidak mempunyai inovasi baru dan kreatifitas dalam pengembangan unit usaha[6]. Dapat disimpulkan permasalahan Sumber Daya Manusia juga mempengaruhi BUMDes mengalami kegagalan dan tidak dapat dipungkiri tuntutan profesionalisme dari masyarakat untuk pengelolaan BUMDes agar mampu memberikan hasil baik dari kinerja BUMDes tersebut dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat desa. Selain itu permasalahan pendanaan juga menjadi faktor pendukung dalam kegagalan BUMDes di Indonesia. Berdasarkan penelitian terdahulu dari (Abulallah, Kamaluddin, 2019) [7] memaparkan bahwa permasalahan yang dialami oleh BUMDes Kawasan Pertambangan Emas di daerah Sumbawa Barat dipengaruhi oleh minimnya

pendanaan yang dijadikan sebagai modal utama BUMDes untuk berkembang menjadi BUMDes yang mandiri. Adapun penelitian terdahulu yang membahas tentang kegagalan BUMDes yang dipengaruhi oleh permasalahan pengelolaan unit usaha (Lobwaer, 2020) [8] menjelaskan bahwa dalam proses pemilihan unit usaha BUMDes yang secara portofolio ada tetapi untuk operasional tidak dijalankan atau beroperasi faktor inilah yang menjadi kelemahan dalam pengelolaan bisnis serta bisnis yang tidak sesuai dengan potensi desa menyebabkan bisnis yang dijalankan menjadi tidak kontributif dan berpotensi mengalami kegagalan.

Berdasarkan fenomena permasalahan BUMDes secara umum di atas hal serupa juga terjadi di BUMDes Wijaya Kusuma di mana dalam penelitian ini mengambil fokus penelitian BUMDes Wijaya Kusuma yang berlokasi di Kalurahan Kedung Keris, Kapanewon Nglipar Gunungkidul, BUMDes Wijaya Kusuma sudah terbentuk sejak tahun 2014 di mana unit usaha yang kembang oleh BUMDes adalah Pengadaan Barang dan Pariwisata. Pengelolaan BUMDes agar dapat menjadi Badan Usaha yang tangguh dan mandiri maka harus dikelola oleh Sumber Daya Manusia yang profesional, sebuah organisasi tidak akan dapat melakukan apapun tanpa adanya sumber daya manusia. Untuk BUMDes Wijaya Kusuma Sumber Daya Manusianya berasal dari perekrutan dan sebagian juga berasal dari Karang Taruna yang telah mengikuti pendampingan dan pelatihan dulu sebelum ikut berpartisipasi dalam mengurus BUMDes.

Untuk mengelola unit usaha di bagian sektor pengadaan barang BUMDes Wijaya Kusuma dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip transparansi,

akuntabilitas, efisiensi, dan profesionalitas[9]. Selain itu BUMDes Wijaya Kusuma juga mengembangkan unit usaha di sektor pariwisata di mana memanfaatkan potensi desa yang ada yaitu wisata bernuansa petualangan. Di Kalurahan Kedung Keris sendiri terdapat sebuah sungai yang di beri nama Bacin lalu di kembangkan oleh sekelompok pemuda karan taruna desa menjadi sebuah objek wisata yang menyajikan suguhan alam yang menawan. Sejak awal terbentuknya unit usaha pariwisata pada tahun 2015 dan populer pada tahun 2017, Sungai bacin dimanfaatkan sebagai wadah olahraga air seperti river tubing atau jelajah sungai di mana trek yang disediakan sejauh lima kilometer. Di tengah perjalanan ada dua tempat pemberhentian berupa air terjun. Selain river tubing pengelolah wisata juga menyediakan sensasi petualangan dengan menaiki mobil off road dengan jarak tempuh sejauh 8-10 km. Dengan adanya kepopuleran wisata alam yang ada di Kalurahan Kedung Keris tersebut telah mampu memberikan kebermanfaatan dalam pemberdayaan masyarakat sekitar yang turut mengelola unit usaha pariwisata dan juga mampu meningkatkan pendapatan asli desa dari hasil menggali potensi desa.

Adapun hambatan yang dialami dalam mengelola unit usaha BUMDes baik dari permodalan maupun hambatan lain. Hal serupa juga yang dialami oleh BUMDes Kedung Keris pada tahun 2017 terjadi bencana banjir bandang yang mengakibatkan alat dan peralatan wisata *river tubing* hilang dan bencana banjir tersebut juga menghancurkan track jelajah sungai. Dampak yang dihasilkan dari bencana tersebut membuat unit usaha di sektor pariwisata mengalami kendala dalam berkembang sehingga menjadi awal kegagalan BUMDes Wijaya Kusuma

dalam mengelola unit usaha pariwisata. Seiring berjalannya waktu unit usaha di bidang pariwisata ini mulai tidak berjalan lagi akibat permasalahan pendanaan dan ditambah lagi munculnya pandemi covid-19 membuat tempat-tempat wisata harus tutup dan tidak beroperasi lagi. Selain itu untuk mengukur efektivitas BUMDes Wijaya Kusuma sebelum revitalisasi jika dilihat dari teori yang dipakai dalam penelitian ini efektivitas organisasi menurut (Duncan, 1985) [10] terbagi menjadi tiga tahap, tahap pertama pencapaian tujuan sebelum revitalisasi BUMDes Wijaya Kusuma telah berhasil mengembangkan unit usaha pariwisata yaitu sungai Bacin pada tahun 2015 dan populer pada tahun 2017 ditahun yang sama juga unit usaha pariwisata mengalami kegagalan akibat dari bencana banjir yang menghancurkan trek *river tubing* dan berdasarkan hasil temuan dilapangan peneliti menemukan fakta bahwa pada pengelolaan BUMDes Wijaya Kusuma yang sebelumnya tidak transparan soal pendanaan dan kegiatan BUMDes dalam pengelolaan unit usaha sehingga pada evaluasi tidak mempunyai pembukuan kegiatan BUMDes dan data yang jelas. Selanjutnya tahap integrasi dapat dikatakan berhasil karena dalam pengelolaan unit usaha sebelum revitalisasi BUMDes Wijaya Kusuma dan pemerintahan Kalurahan Kedung Keris melakukan sosialisasi tentang pemetaan potensi desa yang ada di kalurahan Kedung Keris dalam mengembangkan potensi desa yaitu sungai Bacin untuk dijadikan sebagai objek wisata dan setelah melalui tahap sosialisasi BUMDes Wijaya Kusuma merekrut pemuda karang taruna Kalurahan Kedung Keris untuk berkontribusi dalam pengembangan unit usaha pariwisata. Pada awalnya terdapat kendala untuk akses jalan akibat dari kurangnya kesadaran warga dalam mengelola potensi desa, namun seiring berjalannya waktu,

warga mulai sadar dan akhirnya mulai berpartisipasi karena merasakan dampak ekonomi dari sektor wisata sungai Bacin. Tahap ketiga tahap adaptasi dapat dikatakan sebagai kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Ditahap ini BUMDes Wijaya Kusuma mampu mengelola unit usaha pariwisata dengan baik dan mengalami kepopuleran pada tahun 2017 dengan menjadikan sungai Bacin sebagai objek wisata akan tetapi ditahun yang sama juga objek wisata tersebut terkena bencana banjir yang mengakibatkan sarana dan prasana di objek wisata tersebut hancur. Akibat dari bencana tersebut BUMDes Wijaya Kusuma tidak mampu menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya sehingga BUMDes Wijaya Kusuma mengalami kegagalan dan tidak aktif lagi. BUMDes Wijaya Kusuma sempat tidak aktif akibat mengalami kendala dalam pendanaan sehingga pemerintah desa Kedung Keris melakukan revitalisasi organisasi di pertengahan tahun 2021.

Pengertian revitalisasi merupakan sebuah upaya yang mampu mendorong pertumbuhan mengaitkan organisasi kepada lingkungan (Gouillart dan Kelly, 1995)[11]. Adapun proses revitalisasi berpengaruh terhadap perubahan yang dilaksanakan secara quantum leap yaitu memiliki pengaruh besar yang tidak hanya mencakup pada suatu perubahan bertahap atau incremental, melainkan langsung tepat pada sasaran yang jauh berbeda dengan kondisi awal sebuah organisasi. dimana dalam pendekatan revitalisasi harus mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan dan revitalisasi organisasi sendiri bukan sesuatu yang hanya berorientasi pada penyelesaian permasalahan organisasi saja,

tapi juga, melengkapi dengan peningkatan ekonomi masyarakat serta pengenalan budaya yang ada (Ashby, 1999) [12].

Jika dilihat dari aspek ekonomi secara garis besar dampak yang dihasilkan dengan adanya revitalisasi organisasi yaitu mampu mengkomodifikasi kegiatan ekonomi informal dan formal, sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi lingkungan itu sendiri. Untuk Revitalisasi BUMDes dengan pembentukan unit usaha baru diharapkan dapat mendukung proses kegiatan ekonomi. Dalam konteks revitalisasi perlu dikembangkan fungsi campuran yang bisa mendorong terjadinya aktivitas ekonomi. Kenyamanan aktivitas ekonomi merupakan tujuan utama yang ingin dicapai, sehingga diharapkan akan memberikan keuntungan untuk semua pihak yang terlibat. Dalam hal ini tujuan yang akan dicapai dengan adanya revitalisasi yaitu mencapai kesejahteraan untuk seluruh masyarakat.

Untuk aspek sosial dengan adanya revitalisasi BUMDes diharapkan BUMDes dapat menyelenggarakan pelayanan kemasyarakatan dan dapat menunjukkan keberpihakannya terhadap berbagai masalah sosial yang dialami oleh masyarakat desa. Secara umum BUMDes yang pada dasarnya sebagai badan usaha yang dibentuk oleh masyarakat desa, BUMDes tidak hanya dikelola untuk mencari keuntungan (Komersil) akan tetapi juga dikelola dengan prinsip kewirausahaan sosial (*Sosial Entrepreneurship*). Artinya BUMDes harus menjalankan peran dwifungsi, yaitu sebagai lembaga ekonomi komersial dan juga sebagai Lembaga sosial.

Dari pemaparan teori diatas dengan adanya proses revitalisasi harapannya BUMDes mampu menjalankan nilai dan fungsinya sebagai pilar penggerak

ekonomi melalui pengelolaan potensi desa yang BUMDes turut berkontribusi dalam menghasilkan profit sharing dan tetap produktif dalam mengelolah unit usaha. Untuk mengatasi permasalahan ini Pemerintah Kalurahan Kedung Keris telah melakukan penataan ulang tata kelola BUMDes di mana BUMDes Wijaya Kusuma membangun kembali unit usaha wisata namun masih terkendala dengan perizinan. Sementara ini unit yang telah berhasil di kembangkan adalah unit peternakan. Unit peternakan sejauh mengalami progres peningkatan karena di Kalurahan Kedung Keris telah berhasil mengembangkan ayam K.U.B (Kampung Unggulan Balibangtan) yang merupakan ayam varietas baru, dimana ayam ini memiliki keunggulan dari segi fisik dan produktivitas dalam bertelur. Dengan adanya kemajuan di unit usaha ini diharapkan mampu mengembalikan nilai dan fungsi BUMDes sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa dan secara umum mampu memberikan kebermanfaatn untuk masyarakat desa dan dapat menghasilkan keuntungan dengan adanya pengelolaan unit usaha peternakan di Kalurahan Kedung Keris. Setelah proses revitalisasi BUMDes pada penelitian ini juga mau melihat bagaimana efektivitas revitalisasi BUMDes dalam memberdayakan masyarakat sehingga mampu memerikan dampak yang baik pada perekonomian masyarakat desa Kedung Keris. Efektivitas organisasi mudah di mengerti bila dipandang sebagai sebuah kemampuan organisasi, mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada atau tersedianya untuk mencapai tujuannya (Duncan, 1985)[10].

Oleh karena itu dengan adanya dukungan dari pemerintah desa untuk BUMDes tetap bergerak dalam memberikan kekuatan ekonomi untuk masyarakat

maka Kepala Desa Kedung Keris telah melakukan revitalisasi terhadap BUMDes dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi asli BUMDES tersebut sehingga diperlukan adanya revitalisasi untuk mengoptimalkan kinerja dari BUMDes itu sendiri dalam mengelola potensi desa sehingga menghasilkan profit sharing (PADes). Oleh sebab itu penulis mengajukan judul penelitian tentang "Efektivitas Revitalisasi BUMDes Wijaya Kusuma " Mengingat kontribusi BUMDes begitu besar dalam mengelola potensi desa yang berada di Kalurahan Kedung Keris, Dengan pencapaian setelah proses revitalisasi dapat dilihat sudah berkontributif terhadap desa dalam mengembangkan unit usaha peternakan dan diharapkan menjadi percontohan BUMDes yang sempat gagal dan bangkit kembali.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Proses Revitalisasi BUMDes di Kalurahan Kedung Keris?
2. Bagaimana efektivitas BUMDes di Kalurahan Kedung Keris setelah proses revitalisasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah.

1. Untuk mengetahui proses revitalisasi BUMDes Kalurahan Kedung Keris sehingga BUMDes tersebut dapat aktif kembali sesuai nilai dan fungsi dalam mengelolah potensi desa.
2. Untuk mengetahui efektivitas BUMDes Wijaya Kusuma pasca revitalisasi

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai dukungan pemahaman dan pemikiran pengembangan ilmu pemerintahan dalam proses revitalisasi BUMDes dalam mengelola potensi desa, sebagai salah satu strategi atau langkah pemerintah dalam mengaktifkan kembali BUMDes dalam menjalankan nilai dan fungsinya.

b. Secara Praktis

1. Bagi Pihak Akademik, sebagai bahan informasi tambahan dan referensi bagi mahasiswa lainnya yang ingin membuat skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Bagi Kalurahan Kedung Keris sebagai bahan evaluasi dan masukan kepada BUMDes Kalurahan Kedung Keris
3. Bagi peneliti menjadi tambahan pengetahuan dan keterampilan dalam menulis dan bagi penulis sendiri dan dapat digunakan

sebagai bahan masukan bagi mahasiswa dalam pembuatan penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Bab

1. Bab I merupakan bagian dari pendahuluan. Pada bab ini peneliti menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian baik secara teoritis maupun praktis
2. Bab II merupakan tinjauan pustaka. Pada bagian bab ini peneliti menguraikan tentang landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.
3. Bab III terdiri dari metodologi penelitian. Untuk bab ini peneliti menguraikan tentang jenis penelitian, metode penelitian, waktu dan lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data serta menjelaskan tentang analisis data yang dipakai dalam menyusun penelitian ini.
4. Bab IV terdiri dari bab pembahasan penelitian yang menguraikan tentang hasil penelitian dan hasil analisis peneliti dengan menggunakan cara menyajikan data berdasarkan fakta yang berupa data yang ditemukan di objek penelitian terhadap proses revitalisasi BUMDes Wijaya Kusuma dan serta peneliti menjelaskan tentang efektivitas pasca revitalisasi BUMDes Wijaya Kusuma

5. Bab V adalah bagian penutup dari penulisan penelitian ini dan juga menjadi langkah akhir dari keseluruhan yang berisi tentang penarikan kesimpulan dan saran terhadap efektivitas revitalisasi BUMDes Wijaya Kusuma.

